

BAB 3

PROFIL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

3.1 Gambaran Umum Wilayah

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu provinsi di Pulau Jawa yang memiliki status istimewa dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Secara administratif, wilayah ini terdiri atas empat kabupaten dan satu kota, yaitu Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul, serta Kota Yogyakarta yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan provinsi. Luas wilayah DIY mencapai sekitar 3.185,80 km² yang terbagi ke dalam 78 kapanewon/kecamatan dan 438 kalurahan/kelurahan. Letaknya berada di bagian selatan Pulau Jawa dengan kondisi geografis yang mendukung berbagai aktivitas ekonomi, terutama di sektor pertanian dan pariwisata. Karakteristik fisik wilayah DIY dapat dibedakan menjadi empat satuan fisiografi utama, yakni kawasan Pegunungan Selatan, lereng Gunung Merapi, dataran rendah yang berada di antara Pegunungan Selatan dan Pegunungan Kulon Progo, serta Pegunungan Kulon Progo. Kawasan Pegunungan Selatan yang sebagian besar berada di Kabupaten Gunungkidul mencakup hampir setengah luas wilayah provinsi. Bagian utara wilayah tersebut didominasi oleh bentang lahan struktural, sedangkan wilayah selatan hingga kawasan pesisir berupa perbukitan kapur dan karst yang dikenal sebagai Pegunungan Seribu, sehingga memiliki keterbatasan untuk pengembangan pertanian tanaman semusim.

Wilayah Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan sebagian Kabupaten Bantul bagian utara termasuk dalam kawasan fisiografi vulkanik yang dipengaruhi aktivitas Gunung Merapi. Endapan material vulkanik muda yang menyusun kawasan ini mengandung unsur hara yang tinggi sehingga mendukung produktivitas lahan pertanian. Di sisi lain, wilayah selatan Kabupaten Bantul merupakan dataran aluvial pantai yang terletak di antara Pegunungan Selatan dan Pegunungan Kulon Progo. Kondisi tersebut menjadikan kawasan ini memiliki potensi yang cukup besar untuk kegiatan budidaya pertanian, khususnya tanaman semusim. Sementara itu, Kabupaten Kulon Progo memiliki karakteristik wilayah yang terdiri atas perbukitan di bagian utara dan dataran aluvial di bagian selatan. Karakteristik dataran selatannya relatif serupa dengan wilayah pesisir Kabupaten Bantul dan berpotensi untuk berbagai aktivitas ekonomi berbasis sumber daya lahan (RPJMD DIY Tahun 2022 - 2027).

Kondisi ekonomi wilayah kajian menunjukkan karakteristik yang berbeda pada masing-masing kabupaten sesuai dengan sumber daya dan aktivitas ekonomi yang berkembang di wilayah tersebut. Kabupaten Sleman memiliki struktur ekonomi yang

didominasi oleh sektor jasa, perdagangan, konstruksi, dan real estate. Kondisi ini didukung oleh keberadaan berbagai perguruan tinggi, pusat perbelanjaan, kawasan permukiman, serta fasilitas pelayanan yang terkonsentrasi di wilayah tersebut. Keberadaan institusi pendidikan tinggi yang cukup banyak menjadikan aktivitas pendidikan, penyediaan hunian, jasa penunjang, dan pembangunan properti berkembang secara signifikan. Sementara itu, Kabupaten Bantul dikenal memiliki aktivitas ekonomi yang bertumpu pada sektor industri pengolahan, perdagangan, dan pariwisata. Berbagai sentra industri kerajinan seperti Kasongan dan Manding berkembang sebagai penggerak ekonomi lokal yang didukung oleh usaha mikro, kecil, dan menengah yang tersebar di berbagai wilayah.

Kabupaten Kulon Progo menunjukkan perkembangan ekonomi yang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah beroperasinya Bandara Internasional Yogyakarta (YIA). Kehadiran bandara tersebut mendorong peningkatan aktivitas transportasi, pergudangan, perdagangan, jasa akomodasi, serta pembangunan infrastruktur pendukung di wilayah sekitarnya. Selain itu, sektor pertanian masih menjadi salah satu penopang perekonomian masyarakat. Di sisi lain, Kabupaten Gunungkidul memiliki karakteristik ekonomi yang didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, perikanan, dan pariwisata. Kondisi geografis yang didominasi kawasan karst menyebabkan sebagian besar masyarakat menggantungkan mata pencaharian pada kegiatan pertanian lahan kering dan peternakan. Selain itu, berkembangnya kawasan wisata pantai dan Geopark Gunungsewu turut meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat melalui sektor pariwisata dan jasa pendukung. Perbedaan karakteristik ekonomi tersebut menunjukkan bahwa setiap kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki potensi dan keunggulan ekonomi yang berbeda sesuai dengan kondisi sumber daya, letak geografis, dan aktivitas ekonomi yang berkembang di wilayahnya.

Di dalam dokumen perencanaan wilayah, terdapat sejumlah kawasan strategis yang ditetapkan berdasarkan berbagai kepentingan pembangunan. Dari aspek sosial dan budaya, kawasan strategis mencakup wilayah Kesultanan dan Kadipaten yang memiliki nilai historis dan budaya yang tinggi. Berdasarkan kepentingan ekonomi, kawasan yang diprioritaskan meliputi Kawasan Perkotaan Yogyakarta, Kawasan Temon–Prambanan, Kawasan Tempel–Parangtritis, serta Kawasan Pantai Selatan DIY. Adapun dari sudut pandang perlindungan lingkungan dan daya dukung ekologis, kawasan strategis meliputi bentang alam karst dan kawasan gumuk pasir Parangtritis. Selain itu, pemanfaatan sumber daya alam dan penerapan teknologi juga menjadi dasar penetapan kawasan strategis, terutama di wilayah Pantai

Selatan yang diarahkan untuk pengembangan energi terbarukan, seperti tenaga angin dan energi gelombang laut yang tersebar di Kabupaten Kulon Progo, Bantul, dan Gunungkidul.

Berdasarkan RTRW provinsi, terdapat beberapa perubahan yang berpengaruh terhadap arah perkembangan wilayah DIY. Salah satu perubahan utama berkaitan dengan sistem perkotaan, yaitu penyesuaian pusat kegiatan wilayah promosi yang sebelumnya berfokus pada kawasan perkotaan Wates dan Wonosari menjadi kawasan perkotaan Temon, Wates, dan Wonosari. Perubahan tersebut menunjukkan meningkatnya peran Temon dalam struktur ruang wilayah. Selain itu, pembangunan bandar udara baru beserta kawasan pendukungnya dalam konsep kota bandara (*airport city*) di Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo, menjadi salah satu faktor penting yang mendorong transformasi dan pertumbuhan wilayah di bagian barat Provinsi DIY.

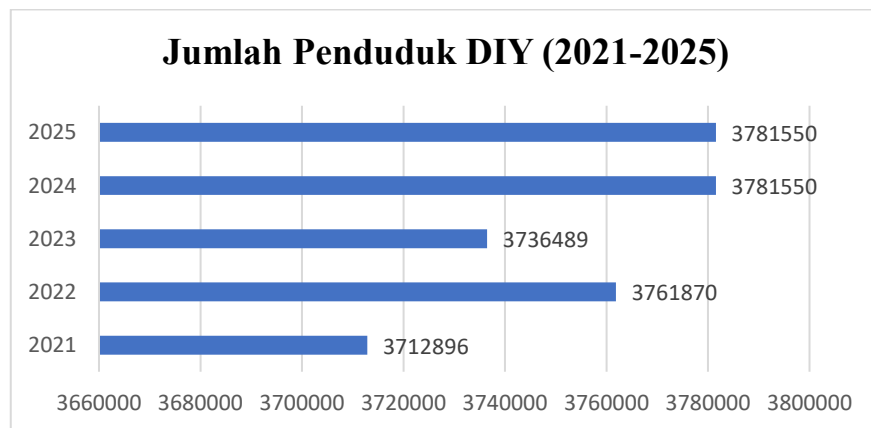
3.2 Aspek Demografi

Aspek demografi merupakan kajian yang berkaitan dengan karakteristik penduduk dalam suatu wilayah yang meliputi jumlah, persebaran, komposisi, dan dinamika penduduk seperti kelahiran, kematian, dan migrasi. Demografi memiliki peran penting dalam perencanaan pembangunan karena perubahan jumlah dan struktur penduduk akan memengaruhi kebutuhan terhadap berbagai fasilitas dan layanan publik.

3.2.1 Jumlah Penduduk

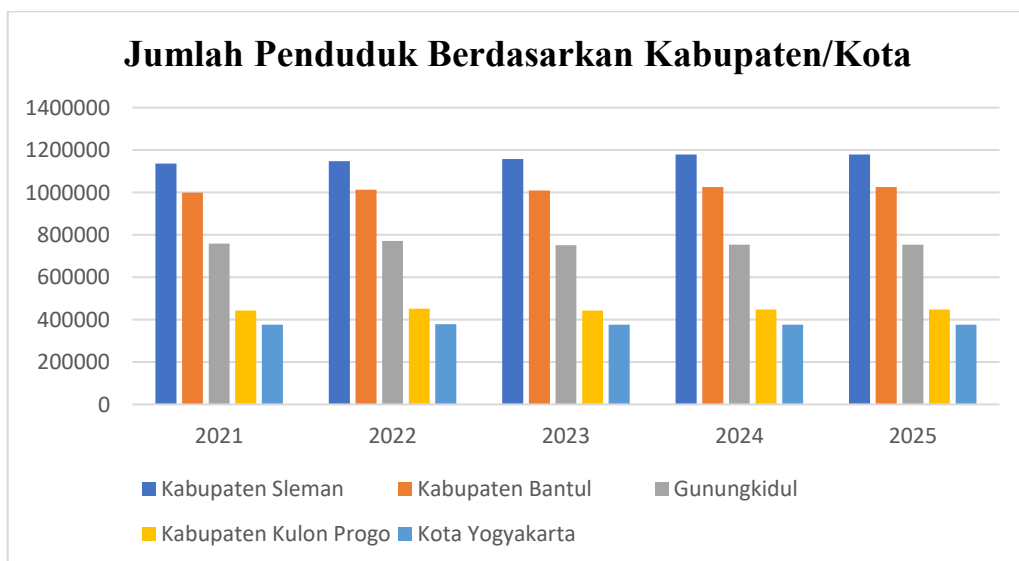
Dinamika jumlah penduduk merupakan aspek yang penting untuk dianalisis karena berpengaruh terhadap perencanaan pembangunan dan penyediaan pelayanan publik. Besarnya populasi suatu wilayah akan menentukan tingkat kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, perumahan, serta berbagai sarana pendukung lainnya. Data kependudukan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) periode 2021 – 2025 menunjukkan kecenderungan pertumbuhan penduduk yang positif. Jumlah penduduk yang pada tahun 2021 mencapai 3.712.896 jiwa meningkat menjadi 3.761.870 jiwa pada tahun 2022, meskipun pada tahun 2023 sempat mengalami penurunan sebelum kembali bertambah pada periode selanjutnya. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan menjadi 3.736.489 jiwa sebelum kembali meningkat pada tahun 2025 menjadi 3.781.550 jiwa. Secara umum, tren ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk di DIY relatif stabil dengan dinamika yang dipengaruhi oleh faktor alami maupun migrasi. Berdasarkan grafik jumlah penduduk di bawah, Kabupaten Sleman merupakan daerah dengan jumlah penduduk terbesar selama lima tahun terakhir dan mengalami peningkatan yang konsisten dari 1.136.474 jiwa pada

tahun 2021 menjadi 1.179.380 jiwa pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa Sleman mengalami peningkatan pertumbuhan penduduk di DIY, kemungkinan akibat tingginya tingkat urbanisasi dan perkembangan kawasan permukiman. Kabupaten Bantul menempati urutan kedua dengan jumlah penduduk yang juga terus meningkat dari 998.647 jiwa pada tahun 2021 menjadi 1.025.750 jiwa pada tahun 2025.



Sumber: BPS DIY Dalam Angka 2021-2025

Gambar 5. Jumlah Penduduk DIY



Sumber: BPS DIY Dalam Angka 2021-2025

Gambar 6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kabupaten/Kota

Sementara itu, Kabupaten Gunungkidul memiliki jumlah penduduk yang relatif stabil di kisaran 750 ribu jiwa dengan pertumbuhan yang tidak terlalu signifikan. Kabupaten Kulon Progo menunjukkan peningkatan jumlah penduduk secara bertahap dari 443.283 jiwa pada tahun 2021 menjadi 447.460 jiwa pada tahun 2025, yang dapat dikaitkan dengan adanya pengembangan wilayah seperti pembangunan bandara dan infrastruktur pendukung. Di sisi lain, Kota Yogyakarta sebagai pusat pemerintahan justru memiliki jumlah penduduk

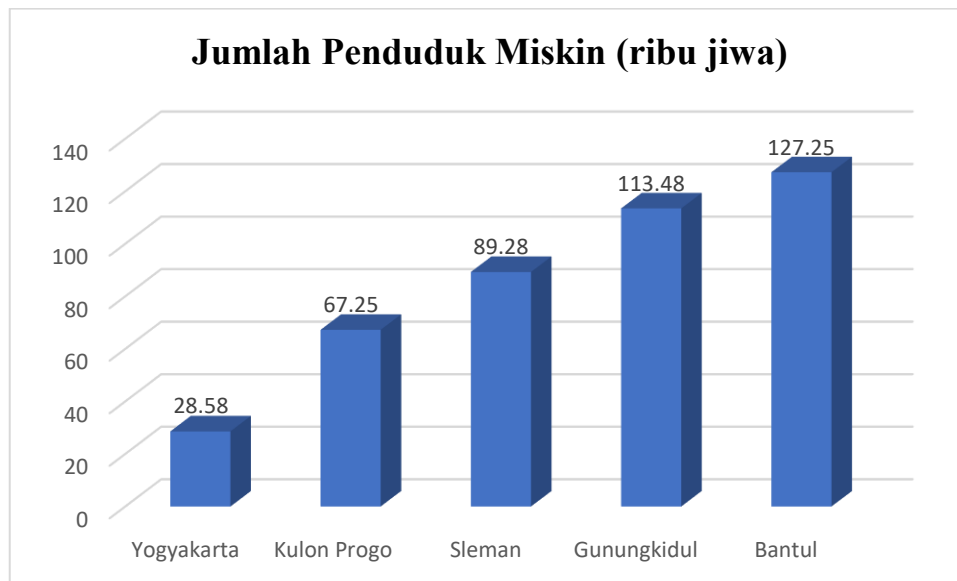
paling kecil dan cenderung stagnan di kisaran 375 ribu jiwa, yang menunjukkan adanya keterbatasan lahan dan kecenderungan pergeseran penduduk ke wilayah pinggiran. Secara keseluruhan, pola pertumbuhan penduduk di DIY menunjukkan bahwa Kabupaten Sleman mengalami pertumbuhan yang lebih pesat dibandingkan wilayah pusat seperti Kota Yogyakarta. Hal ini mengindikasikan adanya perluasan kawasan perkotaan ke wilayah sekitar.

3.2.2 Jumlah Penduduk Miskin

Penduduk miskin merupakan kelompok masyarakat yang tingkat pengeluarannya berada di bawah garis kemiskinan sehingga belum mampu memenuhi kebutuhan dasar secara memadai. Kebutuhan dasar tersebut mencakup kebutuhan pangan maupun nonpangan, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, layanan kesehatan, serta berbagai kebutuhan sosial yang diperlukan untuk menjalani kehidupan yang layak. Penentuan status kemiskinan umumnya mengacu pada garis kemiskinan yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yaitu batas minimum pengeluaran yang harus dipenuhi seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Individu atau rumah tangga yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah batas tersebut dikategorikan sebagai penduduk miskin. Oleh karena itu, jumlah penduduk miskin sering digunakan sebagai salah satu indikator utama dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat suatu wilayah. Semakin besar jumlah penduduk miskin, semakin rendah tingkat kesejahteraan yang dapat dicapai oleh masyarakat di wilayah tersebut (Lumbanraja dkk., 2024).

Berdasarkan data BPS DIY Dalam Angka 2026 yang disajikan pada Gambar 7, distribusi jumlah penduduk miskin di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan variasi yang cukup mencolok antar kabupaten/kota. Kabupaten Bantul tercatat sebagai wilayah dengan jumlah penduduk miskin terbesar, yakni sekitar 127,25 ribu jiwa. Posisi berikutnya ditempati oleh Kabupaten Gunungkidul dengan jumlah sekitar 113,48 ribu jiwa. Kabupaten Sleman berada pada kelompok menengah dengan jumlah penduduk miskin mencapai 89,28 ribu jiwa. Sementara itu, Kabupaten Kulon Progo memiliki sekitar 67,25 ribu jiwa penduduk miskin. Di antara seluruh wilayah di DIY, Kota Yogyakarta memiliki jumlah penduduk miskin paling sedikit, yaitu sekitar 28,58 ribu jiwa. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan tingkat kesejahteraan antarwilayah yang masih menjadi tantangan dalam pembangunan daerah. Perbedaan jumlah penduduk miskin ini menunjukkan adanya ketimpangan kesejahteraan antar wilayah di DIY. Wilayah seperti Bantul dan Gunungkidul yang memiliki jumlah penduduk miskin lebih tinggi. Sebaliknya,

Kota Yogyakarta memiliki jumlah penduduk miskinnya lebih rendah. Berikut merupakan grafik jumlah penduduk miskin DIY tahun 2025.

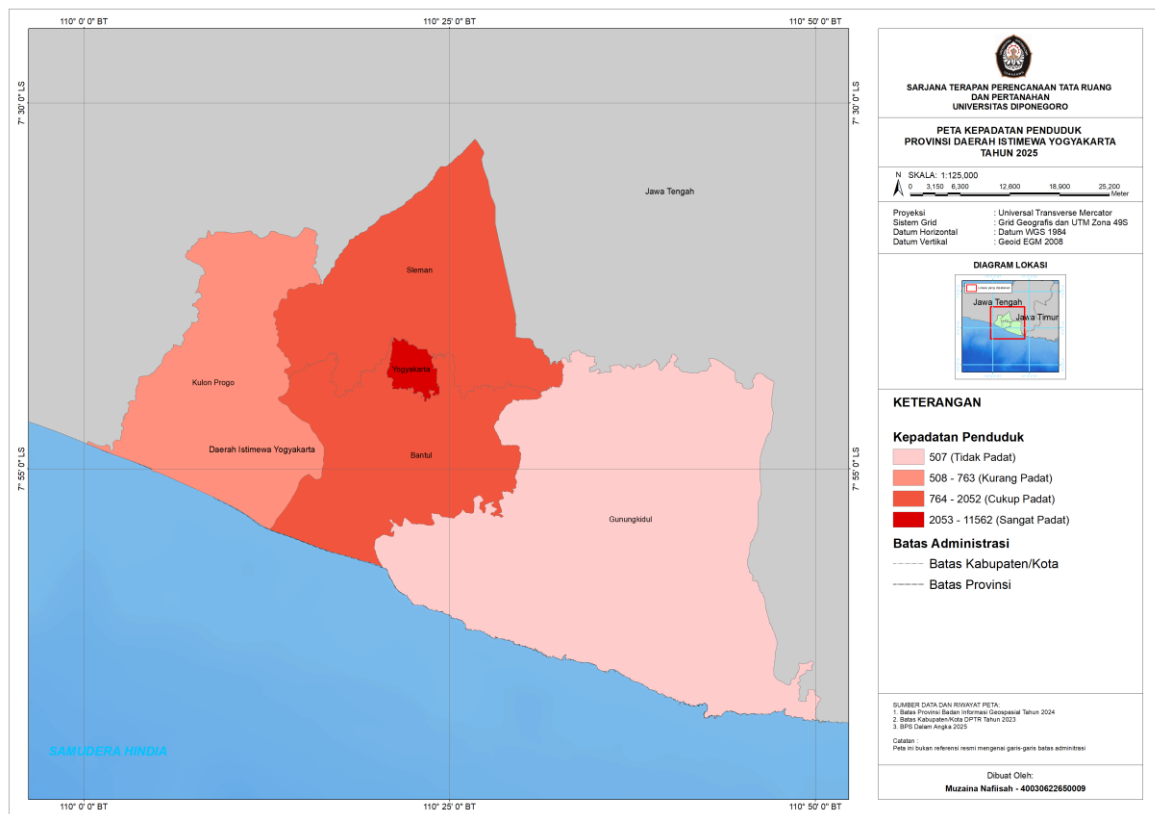


Sumber: BPS DIY Dalam Angka 2025

Gambar 7. Jumlah Penduduk Miskin DIY

3.2.3 Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk menunjukkan tingkat konsentrasi penduduk dalam suatu wilayah berdasarkan perbandingan antara jumlah penduduk dan luas area yang dihuni. Indikator ini biasanya dinyatakan dalam satuan jiwa per kilometer persegi (jiwa/km^2) dan sering digunakan untuk menganalisis pola distribusi penduduk antarwilayah. Nilai kepadatan penduduk yang tinggi mengindikasikan adanya konsentrasi aktivitas manusia yang besar sehingga berpotensi meningkatkan kebutuhan terhadap lahan, fasilitas pelayanan, serta infrastruktur. Sebaliknya, kepadatan penduduk yang rendah mencerminkan ketersediaan ruang yang relatif lebih luas dibandingkan jumlah penduduk yang menempatnya, sehingga tekanan terhadap sumber daya wilayah cenderung lebih rendah. Pada gambar 8 menunjukkan bahwa kepadatan penduduk dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pertumbuhan penduduk, kondisi fisik wilayah, ketersediaan fasilitas umum, kondisi ekonomi, dan tingkat urbanisasi serta migrasi. Berdasarkan data BPS Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2026 menunjukkan Kota Yogyakarta merupakan daerah dengan klasifikasi sangat padat. Pada Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul merupakan daerah dengan klasifikasi cukup padat, Kabupaten Kulon Progo merupakan daerah dengan klasifikasi kurang padat, dan Kabupaten Gunungkidul merupakan daerah dengan klasifikasi tidak padat. Berikut merupakan visualisasi dari kepadatan penduduk DIY tahun 2025.



Sumber: Hasil Analisis, 2026

Gambar 8. Peta Kepadatan Penduduk DIY

3.3 Aspek Ekonomi

Aspek ekonomi merupakan salah satu faktor penting yang dapat diukur melalui indikator PDRB, PDRB per kapita, dan laju pertumbuhan ekonomi. PDRB mencerminkan kapasitas ekonomi suatu wilayah dalam menghasilkan barang dan jasa, sedangkan PDRB per kapita menunjukkan rata-rata nilai tambah ekonomi yang dinikmati oleh penduduk. Adapun laju pertumbuhan ekonomi menggambarkan dinamika perkembangan aktivitas ekonomi dari waktu ke waktu. Wilayah yang memiliki kinerja tinggi pada ketiga indikator tersebut umumnya menunjukkan struktur ekonomi yang lebih kuat dan kompetitif. Dengan kondisi tersebut, wilayah tersebut cenderung memiliki kemampuan yang lebih besar dalam menarik investasi, memperluas kesempatan kerja, serta menjadi motor penggerak pembangunan bagi wilayah-wilayah di sekitarnya.

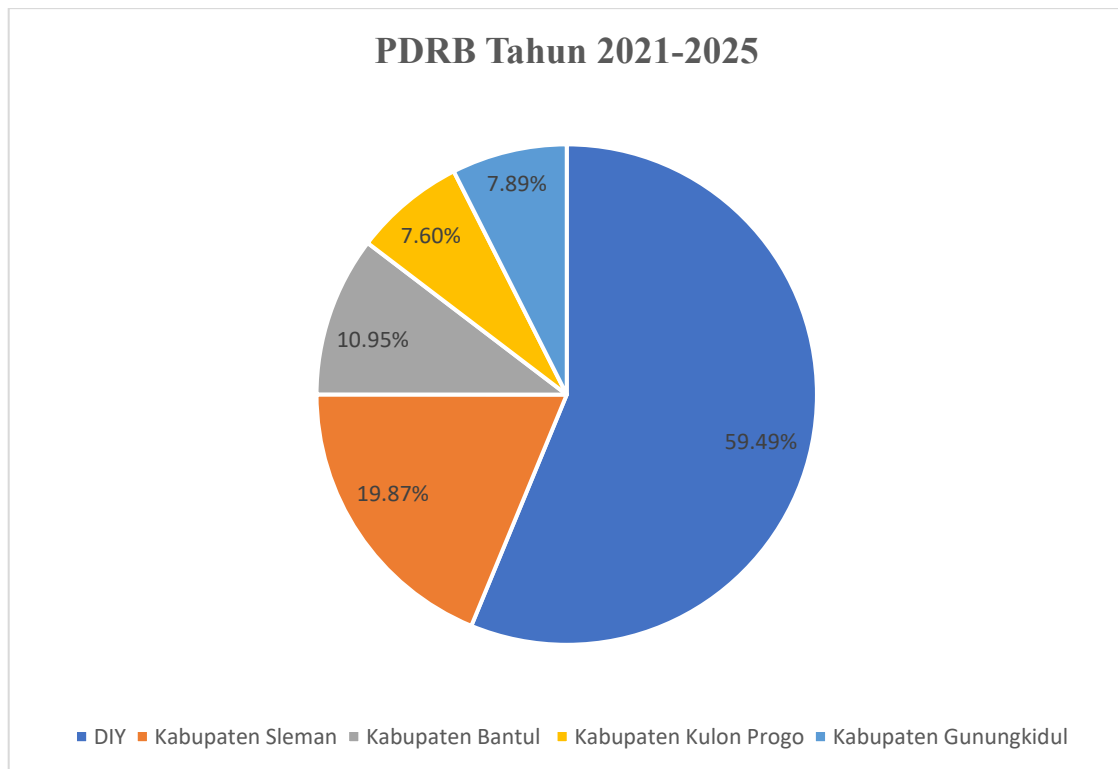
3.3.1 PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit ekonomi di suatu wilayah dalam periode tertentu. PDRB menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam menciptakan *output* ekonomi dan menjadi indikator penting dalam menilai kinerja serta keberhasilan pembangunan secara makro (Romhadhoni dkk., 2019). Selain itu, PDRB juga dapat

digunakan untuk melihat struktur ekonomi, tingkat kontribusi masing-masing sektor, dan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan PDRB per kapita. Di dalam studi ekonomi wilayah, PDRB digunakan sebagai indikator utama untuk mengukur kapasitas dan struktur perekonomian suatu daerah. Berbagai metode analisis regional, seperti Tipologi *Klassen* dan *Location Quotient* (LQ), memanfaatkan data PDRB untuk mengevaluasi tingkat pertumbuhan ekonomi, kontribusi sektoral, serta keunggulan komparatif yang dimiliki suatu wilayah. Oleh sebab itu, informasi PDRB menjadi landasan penting dalam mengidentifikasi karakteristik perkembangan daerah dan menentukan sektor-sektor ekonomi yang memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan wilayah.

Penggunaan PDRB atas dasar harga konstan dalam tipologi *Klassen* dan LQ bertujuan untuk menghilangkan pengaruh inflasi atau perubahan harga dari waktu ke waktu. PDRB harga konstan mencerminkan perubahan volume atau output riil dari kegiatan ekonomi, sehingga mampu menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya. Jika menggunakan PDRB atas dasar harga berlaku, maka hasil analisis dapat bias karena kenaikan nilai PDRB belum tentu disebabkan oleh peningkatan produksi, melainkan bisa dipengaruhi oleh kenaikan harga. Dengan demikian, penggunaan harga konstan memberikan hasil analisis yang lebih akurat dalam menggambarkan dinamika pertumbuhan ekonomi dan struktur sektor. Penggunaan data PDRB dalam rentang waktu lima tahun dalam metode *Klassen* dan LQ bertujuan untuk memperoleh gambaran tren yang lebih stabil. Data dalam satu tahun saja cenderung bersifat fluktuatif dan dapat dipengaruhi oleh faktor jangka pendek, seperti kondisi musiman, kebijakan sementara, atau gangguan ekonomi tertentu. Dengan menggunakan data selama lima tahun, analisis dapat menangkap pola pertumbuhan yang lebih konsisten, mengurangi bias akibat kerusakan data, dan meningkatkan validitas hasil klasifikasi wilayah dan sektor ekonomi.

Periode lima tahun juga dianggap cukup untuk merepresentasikan siklus pembangunan jangka menengah, sehingga hasil analisis menjadi lebih relevan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah. Berikut merupakan data PDRB Provinsi DIY berdasarkan kabupaten tahun 2021 – 2025 menggunakan harga konstan 2010. Nilai terbesar adalah Provinsi DIY sebesar 59,49% dari total nilai pada grafik. Hal tersebut menunjukkan bahwa keseluruhan, PDRB tingkat provinsi jauh lebih besar dibandingkan masing-masing kabupaten. Di tingkat kabupaten, Kabupaten Sleman memiliki nilai PDRB tertinggi, yaitu 19.87%. Hal ini menunjukkan Sleman menjadi kabupaten dengan kontribusi ekonomi paling besar dibanding Bantul, Gunungkidul, dan Kulon Progo. Data PDRB 2021 – 2025 dapat dilihat pada lampiran 1-5.



Sumber: Hasil Analisis, 2026

Gambar 9. PDRB Tahun 2021-2025

3.3.2 PDRB Per Kapita

PDRB per kapita sering digunakan sebagai ukuran untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan dan kemampuan ekonomi masyarakat suatu daerah. Semakin besar nilai PDRB per kapita, semakin tinggi pula rata-rata pendapatan yang dinikmati oleh penduduk, sehingga dapat menjadi indikasi meningkatnya tingkat kemakmuran masyarakat. Nilai PDRB per kapita diperoleh dari hasil pembagian antara total PDRB suatu wilayah dengan jumlah penduduknya. Oleh karena itu, indikator ini banyak dimanfaatkan dalam analisis pembangunan ekonomi untuk membandingkan tingkat kesejahteraan antarwilayah. Adapun formulasi yang digunakan untuk menghitung pendapatan perkapita menurut Tilome dkk (2021) yaitu sebagai berikut.

$$P = \left(\frac{\sum PDRBt}{Nt} \right)$$

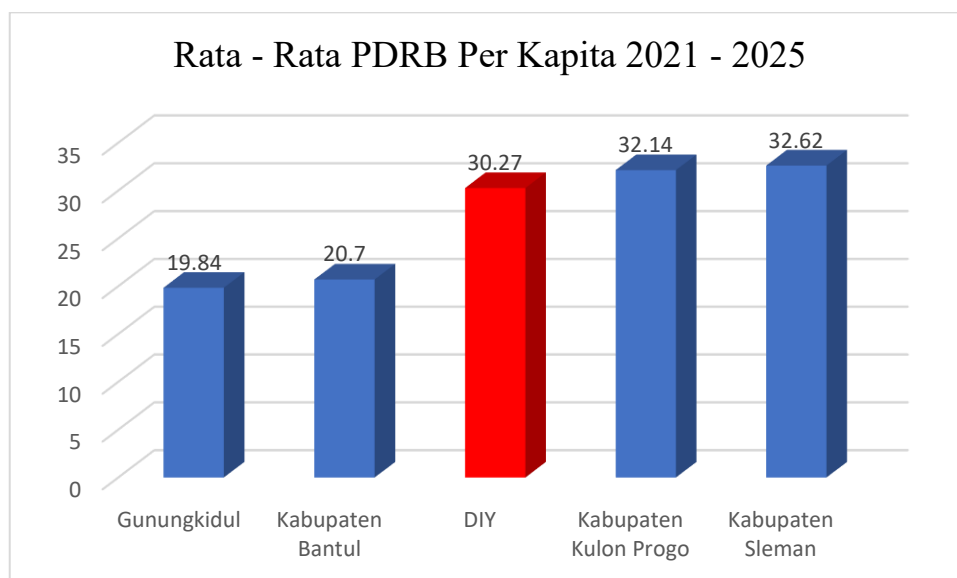
Keterangan :

P = PDRB Per Kapita

$\sum PDRBt$ = Jumlah nilai PDRB pada tahun tertentu

Nt = Jumlah penduduk pada tahun tertentu

Berdasarkan gambar 10 menyatakan bahwa rata-rata PDRB per kapita DIY tahun 2021-2025 sebesar 30,27. Kabupaten Sleman memiliki nilai tertinggi yaitu (32,62) disusul Kabupaten Kulon Progo (32,14) sehingga menunjukkan tingkat kesejahteraan dan produktivitas ekonomi yang lebih baik dibanding wilayah lainnya.



Sumber : Hasil Analisis, 2026

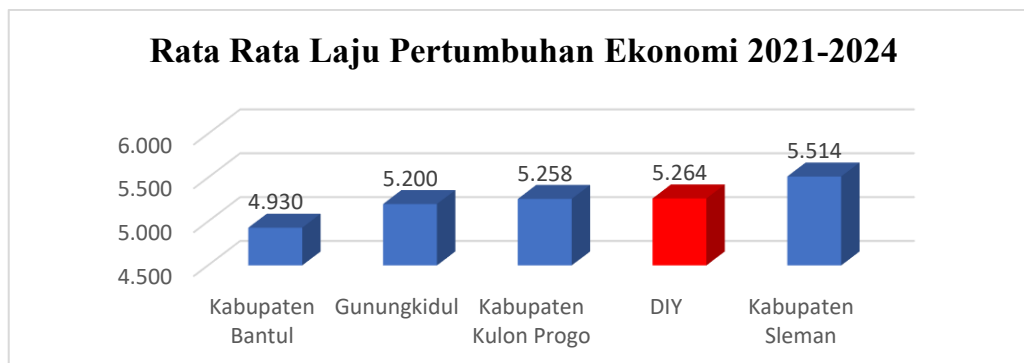
Gambar 10. Rata - Rata PDRB Per Kapita 2021-2025

Sementara itu, Bantul (20,7) dan Gunungkidul (19,84) memiliki nilai PDRB per kapita yang relatif lebih rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat dan produktivitas ekonominya masih tertinggal dibanding wilayah lain di DIY sehingga menunjukkan adanya ketimpangan antarwilayah, di mana Kabupaten Sleman memiliki PDRB per kapita lebih tinggi dibanding kabupaten lainnya.

3.3.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Tilome dkk (2021) Salah satu indikator yang sering digunakan dalam mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi daerah adalah Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE). Indikator ini menggambarkan tingkat peningkatan aktivitas ekonomi suatu wilayah yang dihitung berdasarkan perubahan nilai PDRB atas dasar harga konstan. Semakin tinggi nilai LPE, semakin baik pula kemampuan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonominya. Berdasarkan data tahun 2021–2025 pada Gambar 11, rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tercatat sebesar 5,26 persen. Kabupaten Sleman menjadi wilayah dengan nilai pertumbuhan tertinggi, yaitu 5,51 persen, yang mengindikasikan bahwa aktivitas ekonomi di wilayah tersebut berkembang lebih cepat dibandingkan kabupaten/kota lainnya di DIY. Kulon Progo berada di posisi kedua dengan 5.258%, diikuti Gunungkidul sebesar 5.20%, dan Bantul sebesar 4.93% Wilayah tersebut

memiliki pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata DIY. Grafik tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi antarwilayah di DIY belum merata.



Sumber : Hasil Analisis, 2026

Gambar 11. Rata - Rata Laju Pertumbuhan Ekonomi DIY

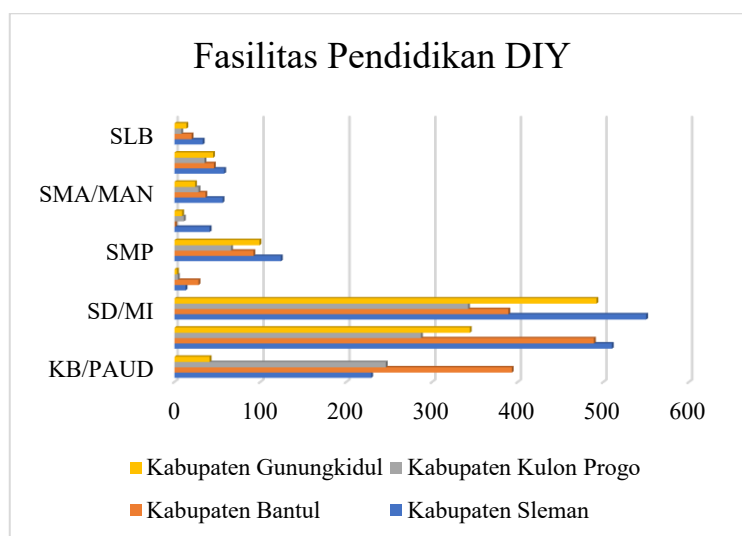
3.4 Aspek Infrastruktur

Infrastruktur merupakan fasilitas publik utama yang berperan penting dalam menunjang perekonomian suatu negara. Keberadaan infrastruktur mampu mendukung berbagai aktivitas ekonomi masyarakat dan memperlancar proses distribusi barang (Iriyena dkk., 2019). Dalam konteks pembangunan wilayah, aspek infrastruktur memiliki peran strategis dalam menentukan pusat pertumbuhan. Wilayah dengan infrastruktur yang baik cenderung lebih menarik bagi investasi karena memberikan kemudahan akses, efisiensi operasional, dan dukungan terhadap kegiatan ekonomi. Kualitas dan kuantitas infrastruktur dapat menjadi indikator tingkat kemajuan suatu daerah. Semakin lengkap dan baik kondisi infrastruktur, maka semakin tinggi pula potensi wilayah tersebut untuk berkembang secara ekonomi. Mengingat pentingnya infrastruktur dalam mendukung aktivitas masyarakat dan perkembangan wilayah, penyediaan infrastruktur menjadi salah satu aspek yang diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan. Keberadaan infrastruktur yang memadai berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Jenis infrastruktur yang dikaji meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, perekonomian, dan transportasi. Hasil perhitungan jumlah sampel dengan menggunakan rumus Slovin menunjukkan bahwa sebanyak 99 unit fasilitas umum dipilih sebagai sampel penelitian dari total populasi fasilitas umum yang terdapat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jumlah sampel tersebut dianggap telah mewakili populasi sehingga dapat digunakan untuk menggambarkan karakteristik fasilitas umum di wilayah penelitian. Jumlah sampel tersebut digunakan untuk mewakili keseluruhan populasi fasilitas umum sehingga analisis yang dilakukan tetap dapat menggambarkan kondisi infrastruktur secara umum. Dengan demikian, sampel yang telah ditentukan melalui

rumus Slovin ini menjadi dasar dalam pengkajian sebaran dan kelengkapan fasilitas umum. Hasil validasi tersebut dapat dilihat pada lampiran 24 – 28.

3.4.1 Fasilitas Pendidikan

Sarana pendidikan merupakan salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan pendidikan yang berfungsi mendukung kegiatan pembelajaran. Ketersediaan fasilitas yang memadai dapat meningkatkan efektivitas proses pendidikan dan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah. Salah satu bentuk fasilitas umum yang sangat penting ini berperan dalam menyediakan layanan pendidikan bagi masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan fasilitas pendidikan seperti sekolah perlu disediakan secara merata agar setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan. Selain itu, ketersediaan fasilitas pendidikan juga memengaruhi pola mobilitas masyarakat, karena pada umumnya individu cenderung memilih lembaga pendidikan yang berlokasi lebih dekat guna menghemat waktu tempuh dan biaya perjalanan (Sasmitasari dkk., 2025). Berikut merupakan fasilitas pendidikan yang ada di Provinsi DIY tahun 2025 berdasarkan Dinas Pertanahan Tata Ruang Provinsi DIY. Validasi fasilitas pendidikan DIY dapat dilihat pada lampiran 23.



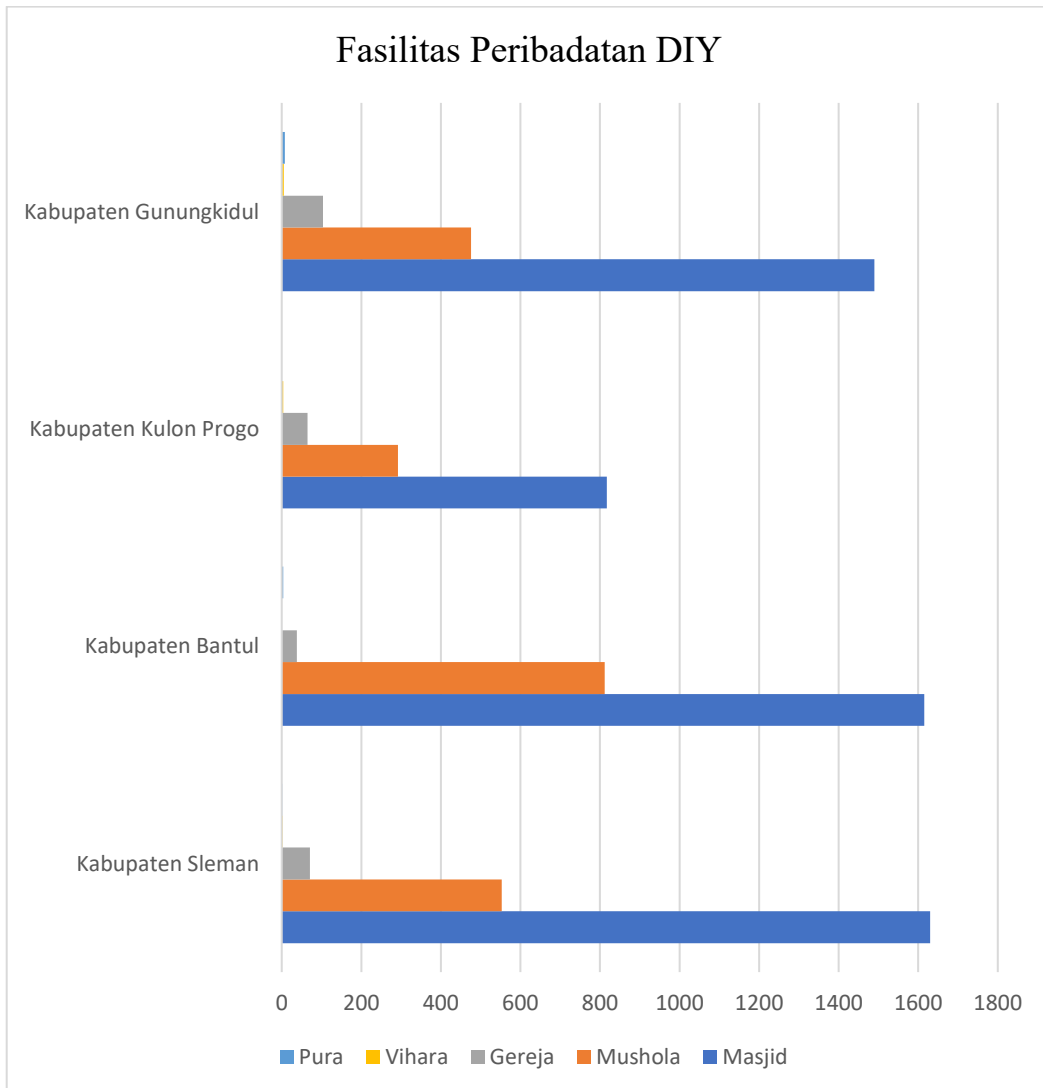
Sumber : DPTR DIY, 2025

Gambar 12. Fasilitas Pendidikan DIY

3.4.2 Fasilitas Peribadatan

Fasilitas peribadatan merupakan salah satu bentuk fasilitas sosial yang berperan dalam memenuhi kebutuhan spiritual masyarakat. Selain digunakan sebagai tempat beribadah, fasilitas ini juga berfungsi sebagai wadah kegiatan sosial dan memperlancar interaksi antaranggota masyarakat (Wunarlan, 2023). Berikut merupakan fasilitas

peribadatan yang ada di Provinsi DIY tahun 2025 berdasarkan Dinas Pertanahan Tata Ruang Provinsi DIY. Validasi fasilitas peribadatan DIY dapat dilihat pada lampiran 24.



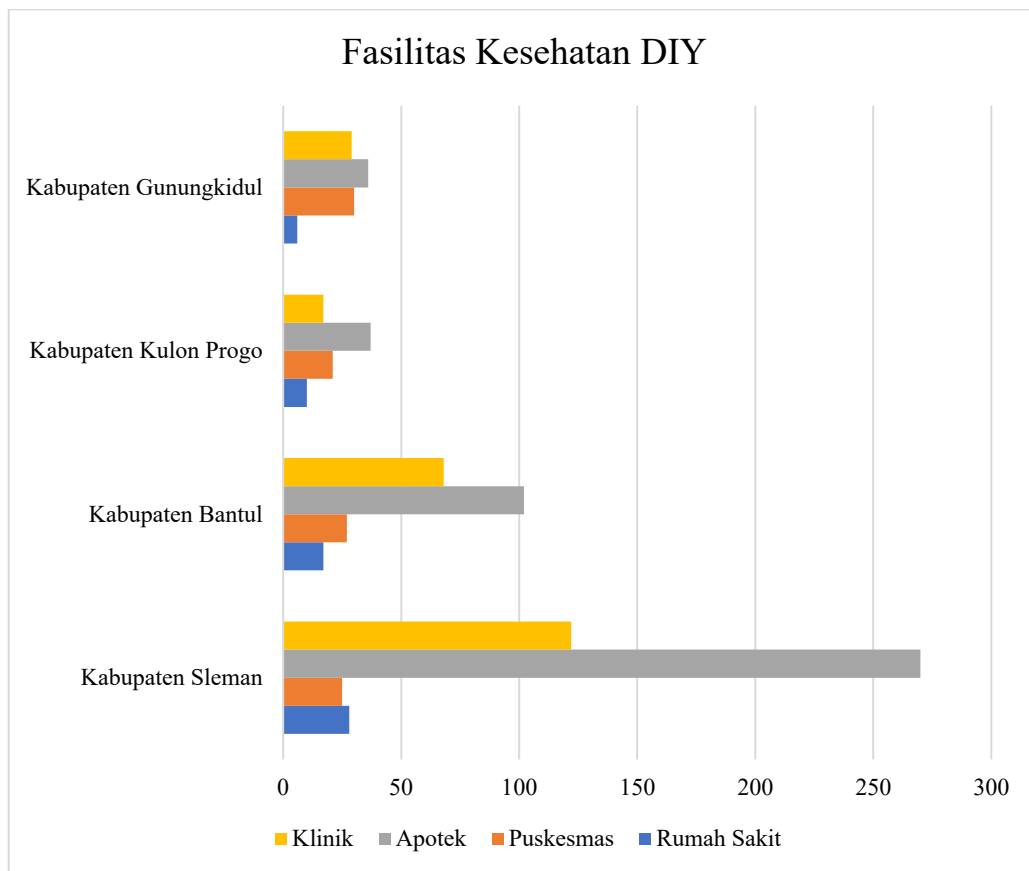
Sumber : DPTR DIY, 2025

Gambar 13. Fasilitas Peribadatan DIY

3.4.3 Fasilitas Kesehatan

Ketersediaan fasilitas kesehatan menjadi salah satu faktor penting dalam pembangunan sosial karena berfungsi sebagai media penyedia layanan kesehatan bagi masyarakat. Melalui layanan pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi, fasilitas kesehatan berkontribusi dalam meningkatkan kualitas kesehatan sekaligus mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Keberadaannya ditujukan untuk menyediakan layanan kesehatan yang dapat diakses secara luas dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat (Wardiah dkk., 2023). Berikut merupakan fasilitas kesehatan yang ada

di Provinsi DIY tahun 2025 berdasarkan Dinas Pertanahan Tata Ruang Provinsi DIY. Validasi fasilitas kesehatan DIY dapat dilihat pada lampiran 25.



Sumber : DPTR DIY, 2025

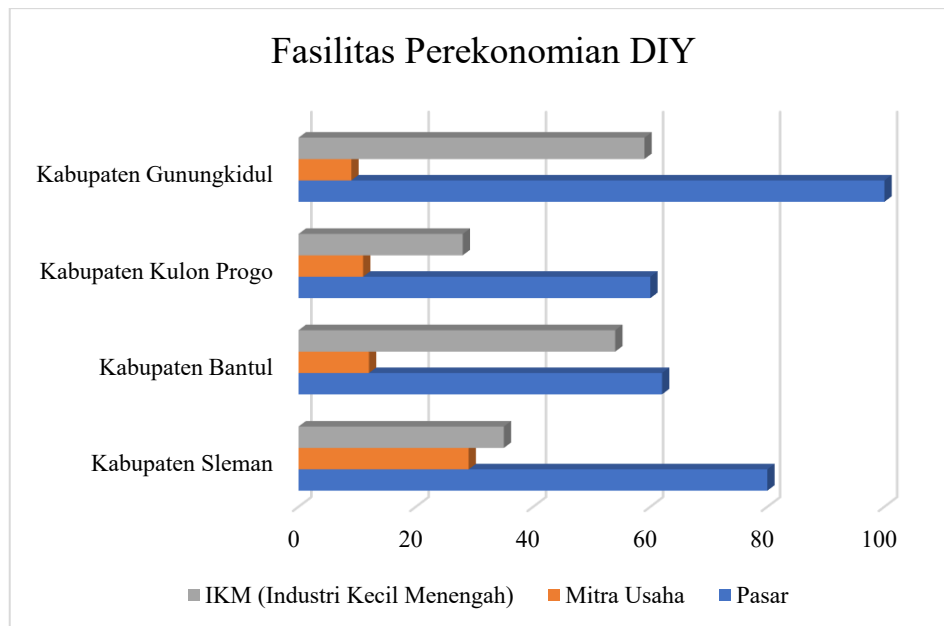
Gambar 14. Fasilitas Kesehatan DIY

3.4.4 Fasilitas Perekonomian

Sarana perekonomian adalah infrastruktur yang disediakan untuk memperlancar kegiatan ekonomi di suatu wilayah. Keberadaan fasilitas tersebut berperan dalam mendukung proses penciptaan barang dan jasa, penyaluran hasil produksi, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui kegiatan konsumsi. Fasilitas ini mencakup berbagai bentuk seperti pasar, toko, pusat perbelanjaan, dan lainnya (Wunarlan, 2023). Di dalam sistem perekonomian daerah, pasar merupakan salah satu infrastruktur ekonomi yang memiliki fungsi strategis sebagai tempat berlangsungnya pertukaran barang dan jasa antara penjual dan pembeli. Peran pasar tidak terbatas pada aktivitas perdagangan semata, tetapi juga sebagai sarana yang mendorong dinamika ekonomi wilayah. Melalui aktivitas ekonomi yang berlangsung di dalamnya, pasar mampu meningkatkan peredaran barang dan jasa, memperkuat hubungan ekonomi antar pelaku usaha, serta memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan dan perkembangan wilayah.

Pola persebaran pasar umumnya terkonsentrasi pada wilayah yang memiliki kepadatan penduduk tinggi dan tingkat keterjangkauan yang baik. Oleh karena itu, pasar banyak berkembang di pusat-pusat permukiman maupun kawasan yang memiliki posisi strategis dalam jaringan transportasi. Faktor lokasi dan kemudahan akses menjadi aspek penting yang memengaruhi keberadaan serta pertumbuhan pasar. Dari sisi ekonomi, keberadaan pasar berperan dalam mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa, memperluas peluang kerja, serta meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Selain itu, perkembangan jumlah dan fungsi pasar dapat mencerminkan tingkat kemajuan ekonomi suatu wilayah karena menunjukkan meningkatnya intensitas kegiatan perdagangan dan interaksi ekonomi masyarakat. Mitra usaha merupakan salah satu fasilitas penting dalam mendukung keberlangsungan dan pengembangan kegiatan ekonomi di suatu wilayah. Mitra usaha dapat diartikan sebagai pihak yang menjalin kerja sama dengan pelaku usaha dalam berbagai bentuk, seperti penyediaan bahan baku, distribusi produk, permodalan, maupun pemasaran. Keberadaan mitra usaha mencerminkan adanya jaringan ekonomi yang saling terhubung dan berkontribusi terhadap dinamika perekonomian daerah.

Industri Kecil dan Menengah (IKM) memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah. Sektor ini tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berfungsi sebagai sumber penciptaan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Perkembangan IKM di wilayah penelitian terlihat dari meningkatnya jumlah usaha, keragaman produk yang dihasilkan, serta penyebaran lokasi usaha yang semakin luas. Aktivitas IKM umumnya didominasi oleh industri pengolahan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal, seperti industri pangan, kerajinan, dan usaha rumah tangga lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa potensi lokal menjadi salah satu faktor utama yang menopang perkembangan sektor ini. Konteks ekonomi regional, IKM memberikan kontribusi terhadap pembentukan PDRB, terutama pada sektor industri pengolahan. Selain itu, karakteristiknya yang padat karya menjadikan IKM berperan penting dalam menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. Dengan demikian, tingkat perkembangan IKM dapat mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam membangun perekonomian yang mandiri dan berkelanjutan. Berikut merupakan fasilitas perekonomian yang ada di Provinsi DIY tahun 2025 berdasarkan Dinas Pertanahan Tata Ruang Provinsi DIY. Validasi fasilitas perekonomian DIY dapat dilihat pada lampiran 26.



Sumber : DPTR DIY, 2025

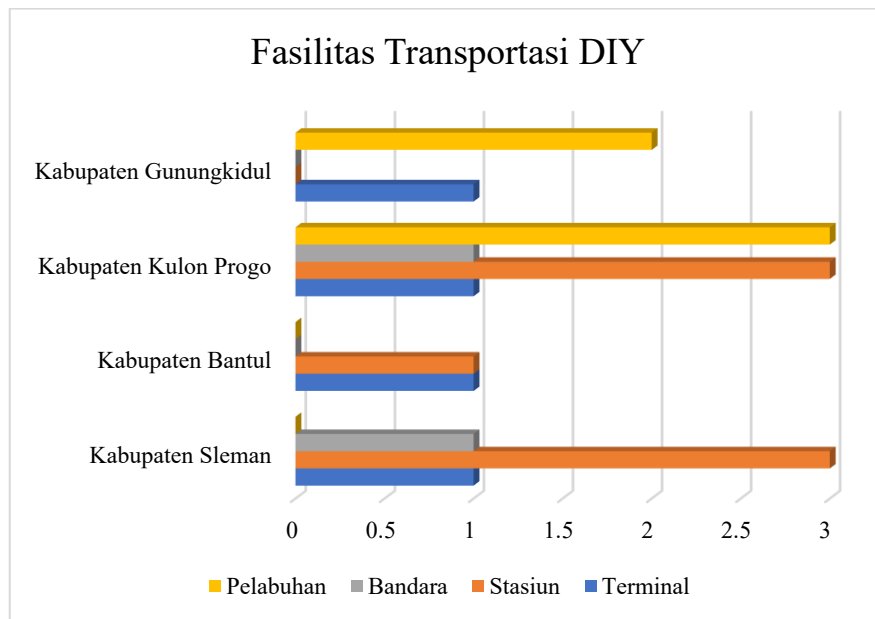
Gambar 15. Fasilitas Perekonomian DIY

3.4.5 Fasilitas Transportasi

Fasilitas transportasi mencakup berbagai sarana dan prasarana yang digunakan untuk memfasilitasi pergerakan penduduk maupun pengangkutan barang dari suatu lokasi ke lokasi lainnya. Keberadaan fasilitas ini berperan penting dalam mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Fasilitas ini meliputi jalan, jembatan, terminal, stasiun, pelabuhan, bandara, dan berbagai moda transportasi. Fasilitas transportasi berperan penting sebagai penghubung antara berbagai fasilitas umum lainnya. Melalui transportasi, masyarakat dapat mengakses layanan seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi dengan lebih mudah. Sistem transportasi yang baik mampu meningkatkan tingkat aksesibilitas, mengatasi kendala jarak, dan mendukung mobilitas masyarakat secara lebih efisien. Oleh karena itu, transportasi menjadi faktor utama dalam menunjang efektivitas penyediaan dan pemanfaatan fasilitas umum secara menyeluruh (Putri, 2022).

Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terdapat tujuh stasiun aktif yang berfungsi sebagai stasiun logistik dan penumpang. Stasiun penumpang tersebut melayani perjalanan baik dalam skala lokal maupun jarak jauh, sehingga mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi barang secara efektif. Selain itu, DIY juga memiliki lima pelabuhan, di mana tiga di antaranya merupakan pelabuhan perikanan yang mendukung aktivitas nelayan, sedangkan dua lainnya berfungsi sebagai pelabuhan penyeberangan yang melayani transportasi antarwilayah. Fasilitas transportasi darat juga didukung dengan keberadaan terminal di setiap kabupaten. Di samping itu, terdapat dua bandara yang melayani transportasi udara, yaitu di Sleman dan Kulon Progo. Berikut merupakan fasilitas transportasi yang ada di

Provinsi DIY tahun 2025 berdasarkan Dinas Pertanahan Tata Ruang Provinsi DIY. Terdapat Validasi fasilitas transportasi DIY dapat dilihat pada lampiran 27.



Sumber : DPTR DIY, 2025

Gambar 16. Fasilitas Transportasi DIY